

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA DALAM
UNDANG–UNDANG NOMOR. 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
TERHADAP PENEBAANGAN HUTAN OLEH MASYARAKAT ADAT
UNTUK TUJUAN NON KOMERSIAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR. 95/PUU-XII/2014**

Taufan Adwitya Soleman Salim

1487029

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menjawab penentuan subjek hukum dalam tindak pidana kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 dan pengaruh atau implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 terhadap tindak pidana kehutanan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2104 masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dikecualikan dalam pertanggungjawaban tindak pidana kehutanan selama tindakan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Pengertian masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan harus dikaitkan dengan kebutuhan hidup dari hutan baik kubutuhan sandang, kubutuhan pangan dan kebutuhan papan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUUXII/2104 harus segera dituangkan dalam berbagai kebijakan legislatif dengan perubahan Undang-Undang Kehutanan.

Kata Kunci: Subjek Hukum, Turun Temurun, Kehutanan

**JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL
SANCTIONS IN LAW NUMBER. 18 OF 2013 CONCERNING
PREVENTION AND ERADICATION OF FOREST DAMAGE AGAINST
LOGGING FORESTS BY INDIGENOUS COMMUNITIES FOR NON
COMMERCIAL PURPOSE OF POST DECISION OF THE
CONSTITUTIONAL NUMBER. 95 / PUU-XII / 2014**

Taufan Adwitya Soleman Salim

1487029

Abstrack

The study was conducted to find out and answer the determination of legal subjects in the post-implication of Constitutional Court Decree No.95/PUU-XII/2104 and the implication of a Constitutional Court Decision No.95/PUU-XII/2104 on forestry crimes. The research is a normative research using legislative approach methods, conceptual approach and case approach. Research findings indicate that the post-enactment of the Constitutional Court No 95/PUU-XII/2104 people living under the forest were excluded from the accountability of forestry crimes during the act was not aimed at commercial interests. Understanding the generations of people living in the forest must be linked to the needs of the jungle, both the needs of food and the need of boards. The decision of the Constitutional Court No 95/PUUXII/2104 should be immediately laid out in several legislative policies under the aviation law.

Keywords: Legal Subject, Settlement, Forestry

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SIDANG	iii
PERSETUJUAN REVISI SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. KEGUNAAN PENELITIAN	13
E. KERANGKA PEMIKIRAN	13
F. METODE PENELITIAN	20
G. SISTEMATIKA PENULISAN	25
BAB II	27
A. TINJAUAN UMUM HUKUM ADAT	27
1. Pengertian Hukum Adat	27
2. Sifat Hukum Adat	28
3. Corak Hukum Adat	29
B. ASPEK HUKUM PENGATURAN HUKUM ADAT	30
C. SENGKETA TERKAIT MASYARAKAT	35
BAB III	39
A. HUKUM PIDANA DALAM SISTEMATIKA HUKUM INDONESIA	39
1. Pengertian dan Asas Hukum Pidana	39
a. Asas Legalitas Materiil	43
b. Asas Retroaktif	45
c. Asas Kesalahan	46
d. Asas Pertanggungjawaban Pidana	46
2. Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>)	48

B. ASPEK HUKUM PERIZINAN PENEBAANGAN HUTAN DI INDONESIA	52
1.Perizinan	52
2.Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Izin	54
3.Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin	57
BAB IV	59
A. KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEBAANGAN HUTAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO.95/PUU-XII/2014	59
B. KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.95/PUU-XII/2014	66
BAB V	77
A. SIMPULAN	77
B. SARAN	78

DAFTAR PUSTAKA

